



L K j I P

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PATI



**PEMERINTAH KABUPATEN PATI
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terlaksana penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun Anggaran 2021

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemeintah Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diturunkan kepada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kabupaten Pati.

Kami menyadari laporan ini belum sempurna, untuk itu saran dan kritik yang bersifat membangun untuk perbaikan laporan yang akan datang sangat kami harapkan. Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga laporan ini dapat terselesaikan.

Pati, 31 Desember 2021

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pati



Ir. JOKO GIPTO HASTONO, M.M.

Pembina Tk.I

NIP. 19660110 199203 1 010

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | ii |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| 1.Data Umum Organisasi | 1 |
| a.Dasar Hukum | 1 |
| b.Tupoksi | 1 |
| 2.Struktur Organisasi | 2 |
| 3.Aspek Strategis | 4 |
| 4.Permasalahan Utama(Strategic Issued) | 4 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA | |
| 1. Perjanjian Kinerja | 5 |
| 2.Rencana Anggaran | 6 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA | |
| 1. Capaian Kinerja Organisasi | 9 |
| 2. Realiasi Anggaran | 18 |
| BAB IV PENUTUP | |
| 1. Kesimpulan | 19 |
| Lampiran : | |
| 1. Penetapan Kinerja | |
| 2. Perjanjian Kinerja | |

BAB I PENDAHULUAN

1. Data Umum Organisasi

1.1. *Dasar Hukum*

Pemerintah Kabupaten Pati dalam rangka pembangunan prasarana dan sarana fisik untuk kemajuan pembangunan di wilayah Kabupaten Pati diperlukan instansi teknis yang khusus menangani pembangunan dimaksud.

Berkaitan dengan maksud diatas, maka Pemerintah Kabupaten Pati telah membentuk Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Pati. Dasar hukum berdirinya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DISPERKIM) Kabupaten Pati dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Pati.

1.2. *Tugas Pokok dan Fungsi*

a. Tugas Pokok

Melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

b. Fungsi

- 1). Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- 2). Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Perumahan.
- 3). Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan permukiman.
- 4). Pelaksanaan administrasi urusan pemerintahan bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- 5). Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya

2. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati sesuai laporan keadaan akhir tahun 2021 sebagai berikut :

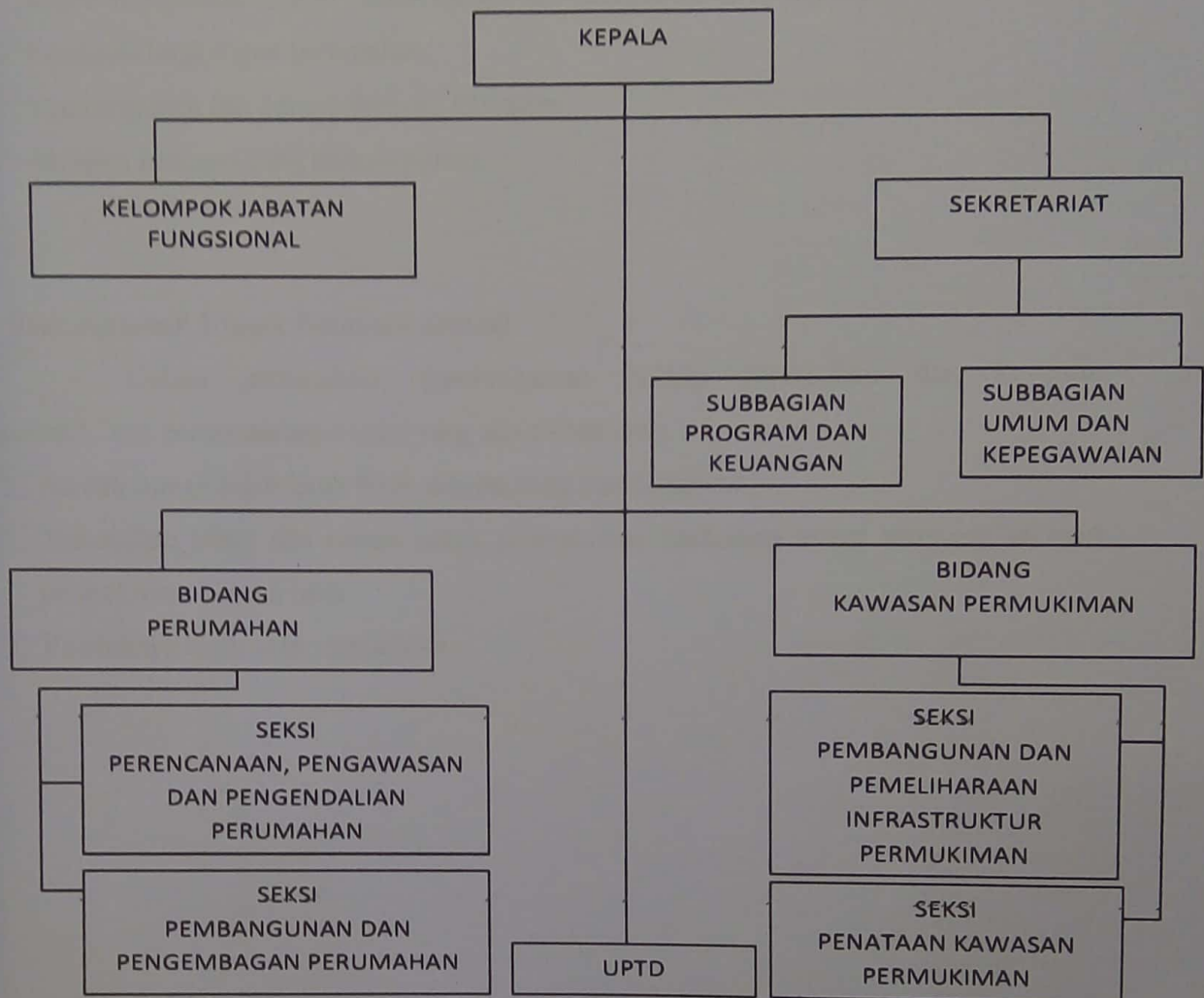
1. Kepala,
2. Sekretariat, membawahi :
 - Sub Bagian Program dan Keuangan,
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Bidang Perumahan, membawahi :
 - Seksi Perencanaan, Pengawasan dan Pengendalian Perumahan,
 - Seksi Pembangunan dan Pengembangan Perumahan.
4. Bidang Kawasan Permukiman, membawahi :
 - Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Permukiman,
 - Seksi Penataan Kawasan Permukiman.
5. UPT Rusun.

Bagan organisasi sebagaimana gambar 1.1

Gambar I.1

Bagan Organisasi Disperkim Kab. Pati.

Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



3. Aspek Strategis

Sesuai dengan strategi Bupati Pati dan Wakil Bupati terpilih dalam mewujudkan visi dan misi, maka strategi DISPERKIM dalam mengaktualisasikan perencanaan pembangunan di Kabupaten Pati secara komprehensif sebagai berikut :

1. Pemberdayaan masyarakat miskin atau MBR melalui pembentukan POKMAS;
2. Penyediaan bantuan rumah swadaya sebagai upaya stimulasi munculnya prakarsa dan upaya masyarakat miskin / MBR dalam membangun rumah yang layak;
3. Penataan lingkungan perumahan;
4. Pembangunan dan pengembangan kawasan;
5. Mitigasi bencana yang berkelanjutan.

4. Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

Dalam pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan kawasan permukiman permasalahan utama yang ada diantaranya :

- 1) Jumlah rumah tidak layak huni dan backlog masih banyak .
- 2) Kebutuhan lahan dan rumah untuk permukiman perkotaan mahal sehingga muncul permukiman kumuh baru.
- 3) Rendahnya kesadaran masyarakat.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2021 ini Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana fisik di Kabupaten Pati.

Untuk mencapai tujuan tersebut maka dalam perencanaan strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati tahun 2021 menetapkan sasaran dan target pencapaian sasaran yang akan dicapai dalam pembangunan sarana dan prasarana dalam tahun 2021. Untuk melihat pencapaian sasaran yang telah ditetapkan tersebut maka ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk menilai kinerja dalam pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.

1. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberi tugas dan tanggung jawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), DISPERKIM Kabupaten Pati berjanji akan mewujudkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja 2021, pada gilirannya mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab DISPERKIM Kabupaten Pati.

Indikator Kinerja utama yang digunakan untuk mengukur kinerja bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang hendak dicapai tahun 2021 adalah sebagai mana tabel II.1 berikut:

Tabel II.1
IKU Disperkim Kab. Pati Tahun 2021

| NO | SASARAN | INDIKATOR KINERJA UTAMA | TARGET |
|----|---|--|---------|
| 1 | Berkurangnya kawasan permukiman kumuh | Persentase pengurangan kawasan kumuh | 0,533% |
| 2 | Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni | 1.Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH)di kawasan kumuh | 89,842% |
| | | 2. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH)di luar kawasan kumuh | 29,31 % |
| | | 3. Persentase pengurangan <i>backlog</i> | 2,564 % |

Sumber : Lampiran Perjanjian Kinerja Disperkim Kab. Pati Tahun 2021

2. RENCANA ANGGARAN

Dalam dokumen Kebijakan Umum APBD Tahun 2021, belanja daerah diprioritaskan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan dan pelayanan dasar yang sesuai dengan kewenangan, baik urusan wajib maupun urusan pilihan. Belanja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2021 sebesar Rp. 11.360.378.000 terdiri atas Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.221.607.700 (atau 37,16 % dari total anggaran) dan Belanja Langsung sebesar Rp. 7.138.770.300 (atau 62,84% dari total anggaran 2021). Hal ini dapat dilihat pada tabel II.2 dibawah ini:

Tabel II.2
Rencana Anggaran Belanja Langsung dan Tidak Langsungl.
Disperkim Kab. Pati Tahun 2021

| No | Uraian | Anggaran (Rp) | % |
|----|------------------------|----------------|-------|
| 1. | Belanja Tidak Langsung | 4.221.607.700 | 37,16 |
| 2. | Belanja Langsung | 7.138.770.300 | 62,84 |
| | Total Belanja | 11.360.378.000 | 100 |

Sumber : DPA Disperkim Kab. Pati Tahun 2021

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2021 yang dialokasikan untuk membiayai program-program prioritas yang langsung mendukung pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel II.3
Alokasi Belanja Langsung Untuk Program Prioritas.
Disperkim Kab. Pati Tahun 2021

| No. | Sasaran Strategis | Anggaran (Rp) | % |
|-----|---|---------------|-------|
| 1 | Berkurangnya kawasan permukiman kumuh | 1.468.060.600 | 20,56 |
| 2 | Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni | 5.670.709.700 | 79,44 |

Sumber : Disperkim Kab. Pati

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa anggaran yang terbesar dari seluruh sasaran adalah Meningkatkan capaian kebutuhan rumah layak huni yaitu sebesar 79,44 % dari total belanja langsung.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati akan memberikan supervisi yang diperlukan berupa penggunaan sumber daya yang lebih maksimal, pengelolaan kegiatan yang lebih cepat dan baik serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2021 adalah perwujudan kewajiban dinas untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Pada bab ini akan disajikan uraian hasil perbandingan target dan realisasi kinerja, perbandingan realisasi kinerja dan capaian kinerja, perbandingan realisasi kinerja dan target jangka menengah, analisis penyebab keberhasilan, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya, analisis program dan kegiatan serta realisasi anggaran di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati.

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dikelompokkan dalam skala ordinal sebagai berikut :

- 85 s/d 100 : sangat berhasil
- 70 s/d 84 : berhasil
- 55 s/d 69 : cukup berhasil
- 0 s/d 54 : tidak berhasil

Maka capaian kinerja DISPERKIM dapat digolongkan *sangat berhasil* karena total capaian dari dua sasaran rata-rata **226 persen** dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel III.1
Capaian Indikator Kinerja
Disperkim Kab. Pati Tahun 2021

| SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | satuan | Target | Realisasi | Capaian | Ket |
|---|--|--------|---------|-----------|----------|-----------------|
| Berkurangnya kawasan permukiman kumuh | Persentase pengurangan kawasan kumuh | % | 0,533% | 0,12 % | 564 % | Sangat berhasil |
| Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni | 1.Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) dikawasan kumuh | % | 89,842% | 116,79% | 129,99% | Sangat berhasil |
| | 2. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH)di luar kawasan kumuh | % | 29,31 % | 30,96 % | 105,63 % | Sangat berhasil |
| | 3. Persentase pengurangan backlog | % | 2,564 % | 2,679% | 104,48 % | Sangat berhasil |

Sumber : Dispekim Kab. Pati

I. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pada sub bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Sasaran 1 : Berkurangnya kawasan permukiman kumuh

Dalam usaha mencapai sasaran Berkurangnya kawasan permukiman kumuh sampai dengan tahun 2021 DISPERKIM Kabupaten Pati menetapkan 1 (satu) indikator kinerja utama.

Capaian kinerja tahun 2021 untuk indikator kinerja Persentase pengurangan kawasan kumuh dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel III.2
Capaian Indikator Kinerja Persentase Pengurangan Kawasan Kumuh
Disperkim Kab. Pati Tahun 2021

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | SATUAN | Capaian Kinerja |
|----|---------------------------------------|--------------------------------------|--------|-----------------|
| | | | | 2021 |
| 1 | Berkurangnya kawasan permukiman kumuh | Persentase pengurangan kawasan kumuh | % | 564 |

Sumber : Disperkim Kab. Pati

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Berkurangnya kawasan permukiman kumuh sebagai berikut : Untuk indikator kinerja persentase pengurangan kawasan kumuh dapat dilihat dari pengukuran: jumlah (luas permukiman kumuh SK Bupati dikurangi hasil pengurangan kumuh) dibagi luas seluruh permukiman sekabupaten Pati dikalikan seratus persen. Luas permukiman kumuh dalam SK Bupati 181,58 ha, luas seluruh permukiman 19.428, 48 ha, dan luas kawasan kumuh tertangani sebesar 158,11 ha. Target kondisi kumuh diharapkan tahun 2021 = 0,533%. Target penurunan 2021 = (0,622% - 0,533%) = 0,089%. Realisasi kondisi kumuh yang dicapai tahun 2021 = 0,12%. Realisasi penurunan yang dicapai = 0,622%-0,12% = 0,502%. Jadi persentase hasil capaian = (Realisasi penurunan yg dicapai dibagi target penurunan) kali 100% = (0,502:0,089) x 100% = 564 %.

Tabel III.3

Daftar Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
di Kabupaten Pati

| N O | NAMA LOKASI | LINGKUP ADMINISTRATIF | | | KEKUMUHAN TINGKAT/ KATEGORI | LUAS | KETERANGAN |
|-----|----------------------------|---------------------------|----------------|------------|-----------------------------------|-------|--------------|
| | | RT/RW | DESA | KEC | | | |
| 1 | Bajo | RT 1,2,4/IV dan RW I | Bajomulyo | Juwana | sedang | 21,01 | Masuk Kotaku |
| 2 | Pabrik Padi | RT 1,2,3/ III | Kudukeras | Juwana | sedang | 10,50 | Masuk Kotaku |
| 3 | Bendarwetan | RT1/I dan RT 1,2,3/ V | Bendar | Juwana | sedang | 9,69 | Masuk Kotaku |
| 4 | Kenginan | RT5/I dan RT6,7/III | Growonglor | Juwana | sedang | 3,82 | Masuk Kotaku |
| 5 | Kebonsawahan RT1/I | RT 1/ I | Kebonsawahan | Juwana | ringan | 0,57 | Masuk Kotaku |
| 6 | Kebonsawahan RT2/I | RT 2/ I | Kebonsawahan | Juwana | ringan | 0,71 | Masuk Kotaku |
| 7 | Kebonsawahan RT3,4/I | RT 3,4/ I | Kebonsawahan | Juwana | ringan | 1,04 | Masuk Kotaku |
| 8 | Kaumankulon RT1,2/3 | RT1,2/III | Kauman | Juwana | sedang | 1,92 | Masuk Kotaku |
| 9 | Kaumankulon RT3,4/3 | RT3,4/III | Kauman | Juwana | sedang | 1,05 | Masuk Kotaku |
| 10 | Kaumanwetan RT2,3/I | RT2,3/I | Kauman | Juwana | sedang | 0,40 | Masuk Kotaku |
| 11 | Kaumanwetan RT3,4/I | RT3,4/I | Kauman | Juwana | sedang | 1,11 | Masuk Kotaku |
| 12 | Pajeksan RT1/I | RT1/I | Pajeksan | Juwana | sedang | 1,28 | Masuk Kotaku |
| 13 | Kemasan | RT 1,2/II | Pajeksan | Juwana | sedang | 1,14 | Masuk Kotaku |
| 14 | Kliten | RT 8,9/III | Doropayung | Juwana | sedang | 4,09 | Masuk Kotaku |
| 15 | Bulumanislor RT 3,4/4 | RT 3,4/IV | Bulumanislor | Margoyoso | sedang | 1,36 | Masuk Kotaku |
| 16 | Bulumanislor RT 3 /2 | RT 3 /II | Bulumanislor | Margoyoso | sedang | 0,70 | Masuk Kotaku |
| 17 | Bulumanislor RT 1/I | RT 1/I | Bulumanislor | Margoyoso | sedang | 0,24 | Masuk Kotaku |
| 18 | Bulumaniskidul RT 1/3 | RT 1/III | Bulumaniskidul | Margoyoso | sedang | 2,21 | Masuk Kotaku |
| 19 | Bulumaniskidul RT 5/2 | RT 5/II | Bulumaniskidul | Margoyoso | sedang | 2,17 | Masuk Kotaku |
| 20 | Sungaisat | RT 3/IV Dan RT2/VI | Cebolek Kidul | Margoyoso | sedang | 2,53 | Masuk Kotaku |
| 21 | Menak | RT 1/II Dan 2/III | Cebolek Kidul | Margoyoso | sedang | 2,83 | Masuk Kotaku |
| 22 | Sapu | RT 1/IV | Cebolek Kidul | Margoyoso | sedang | 0,56 | Masuk Kotaku |
| 23 | Sekarjalak RT 2/II | RT 2/II | Sekarjalak | Margoyoso | sedang | 0,43 | Masuk Kotaku |
| 24 | Sekarjalak RT 3/II | RT 3/II | Sekarjalak | Margoyoso | sedang | 1,32 | Masuk Kotaku |
| 25 | Sleko RT 2/ I | RT 2/ I | Semampir | Pati | Ringan | 3,65 | Masuk Kotaku |
| 26 | Sleko RT 8/ II | RT 8/ II | Semampir | Pati | sedang | 2,02 | Masuk Kotaku |
| 27 | Puri Balokan | RT 2/V | Puri | Pati | sedang | 5,52 | Masuk Kotaku |
| 28 | Puri Kacangan | RT 4/ IV | Puri | Pati | Ringan | 1,08 | Masuk Kotaku |
| 29 | Puri Eliem (Lawet) | RT 2/VII | Puri | Pati | sedang | 3,10 | Masuk Kotaku |
| 30 | Winong Wetan RT 2,4/2 | RT 2,4/II | Winong | Pati | sedang | 4,25 | Masuk Kotaku |
| 31 | Winong Kulon RT 11,12,13/3 | RT 11,12,13/III | Winong | Pati | sedang | 7,60 | Masuk Kotaku |
| 32 | Panjunan RT 16,17,20/3 | RT 16,17,20/III | Panjunan | Pati | Ringan | 7,82 | Masuk Kotaku |
| 33 | Sambiroto Wetan | RT 10/I | Sambiroto | Tayu | sedang | 3,38 | Masuk Kotaku |
| 34 | Sambiroto RT 9/I | RT 9/I | Sambiroto | Tayu | sedang | 2,64 | Masuk Kotaku |
| 35 | Sambiroto TPI | RT 5/I | Sambiroto | Tayu | sedang | 4,42 | Masuk Kotaku |
| 36 | Pecingan | RT 6/I | Sambiroto | Tayu | sedang | 4,97 | Masuk Kotaku |
| 37 | Widengan | RT 1,2,3/VII | Margomulyo | Tayu | sedang | 3,42 | Masuk Kotaku |
| 38 | Mbelah | RT 1,2,3/Idan RT 1,2,3/II | Margomulyo | Tayu | sedang | 9,40 | Masuk Kotaku |
| 39 | Randugunting | RT 1,2,4/IV | Pecangaaan | Batangan | Berat | 7,08 | Non Kotaku |
| 40 | Bulak Kidul | RT 5/Idan RT 2,5/II | Banyutowo | Dukuh seti | Berat | 0,96 | Non Kotaku |
| 41 | Klop | RT 7/II | Banyutowo | Dukuh seti | Berat | 0,26 | Non Kotaku |
| 42 | Purbomencil | RT 6/I | Banyutowo | Dukuh | Berat | 10,09 | Non Kotaku |

| | | | | | | | |
|------------------|---------------|------------------------|--------|-------|--------|--------|------------|
| 43 | Puncel Tambak | RT 1,2,4/Idan RT 4/VII | Puncel | seti | Berat | 15,09 | Non Kotaku |
| 44 | Buloh | RT 1,4,5/VI | Kayen | Kayen | sedang | 12,14 | Non Kotaku |
| Luas Keseluruhan | | | | | | 181,58 | |

Sumber : Keputusan Bupati Pati Nomor : 050/1783 Tahun 2017

Realisasi pengurangan kumuh per-Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel III.4 di bawah ini ini :

Tabel III.4
Realisasi Pengurangan kumuh per-Desember 2021
Di Kabupaten Pati

| N O | NAMA LOKASI | LINGKUP ADMINISTRATIF | | | KEKUM U HAN TINGKA T/ KATEG ORI | LUAS (Ha) | Pengu ranga kumuh (Ha) | Sisa kumu h (Ha) | Keterangan |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------|------------|---------------------------------------|-------------|--------------------------|--------------------|--|
| | | RT/RW | DESA | KEC | | | | | |
| 1 | Bajo | RT 1,2,4/IV dan RW 1 | Bajomulyo | Juwana | sedang | 21,01 | 21,01 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 2 | Pabrik Padi | RT 1,2,3/ III | Kudukeras | Juwana | sedang | 10,50 | 10,50 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 3 | Bendarwetan | RT1/I dan RT 1,2,3/ V | Bendar | Juwana | sedang | 9,69 | 9,69 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 4 | Kenginan | RT5/I dan RT6,7/III | Growonglor | Juwana | sedang | 3,82 | 3,82 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 5 | Kebonsawahan RT1/I | RT 1/ I | Kebonsawahan | Juwana | ringan | 0,57 | 0,57 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 6 | Kebonsawahan RT2/I | RT 2/ I | Kebonsawahan | Juwana | ringan | 0,71 | 0,71 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 7 | Kebonsawahan RT3,4/I | RT 3,4/ I | Kebonsawahan | Juwana | ringan | 1,04 | 1,04 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 8 | Kaumankulon RT1,2/3 | RT1,2/III | Kauman | Juwana | sedang | 1,92 | 1,92 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 9 | Kaumankulon RT3,4/3 | RT3,4/III | Kauman | Juwana | sedang | 1,05 | 1,05 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 10 | Kaumanwetan RT2,3/I | RT2,3/I | Kauman | Juwana | sedang | 0,40 | 0,40 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 11 | Kaumanwetan RT3,4/I | RT3,4/I | Kauman | Juwana | sedang | 1,11 | 1,11 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 12 | Pajeksan RT1/I | RT1/I | Pajeksan | Juwana | sedang | 1,28 | 1,28 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 13 | Kemasan | RT 1,2/II | Pajeksan | Juwana | sedang | 1,14 | 1,14 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 14 | Kliten | RT 8,9/III | Doropayung | Juwana | sedang | 4,09 | 4,09 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 15 | Bulumanislor RT 3,4/4 | RT 3,4/IV | Bulumanislor | Margo yoso | sedang | 1,36 | 1,36 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 16 | Bulumanislor RT 3 /2 | RT 3 /II | Bulumanislor | Margo yoso | sedang | 0,70 | 0,70 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 17 | Bulumanislor RT 1/I | RT 1/I | Bulumanislor | Margo yoso | sedang | 0,24 | 0,24 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 18 | Bulumaniskidul RT 1/3 | RT 1/III | Bulumaniskidul | Margo yoso | sedang | 2,21 | 2,21 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 19 | Bulumaniskidul RT 5/2 | RT 5/II | Bulumaniskidul | Margo yoso | sedang | 2,17 | 2,17 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 20 | Sungaisat | RT 3/IV Dan RT2/VI | Cebolek Kidul | Margo yoso | sedang | 2,53 | 2,53 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 21 | Menak | RT 1/II Dan 2/III | Cebolek Kidul | Margo yoso | sedang | 2,83 | 2,83 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 22 | Sapu | RT 1/V | Cebolek | Margo | sedang | 0,56 | 0,56 | - | Sudah ditangani, masih |

| | | | | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|---------------------------|------------|------------|--------|---------------|---------------|--------------|--|
| 23 | Sekarjalak RT 2/II | RT 2/II | Kidul | yoso | | | | | menyisakan RTLH |
| 24 | Sekarjalak RT 3/II | RT 3/II | Sekarjalak | Margo yoso | sedang | 0,43 | 0,43 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 25 | Sleko RT 2/ I | RT 2/ I | Sekarjalak | Margo yoso | sedang | 1,32 | 1,32 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 26 | Sleko RT 8/ II | RT 8/ II | Semampir | Pati | Ringan | 3,65 | 3,65 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 27 | Puri Balokan | RT 2/V | Semampir | Pati | sedang | 2,02 | 2,02 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 28 | Puri Kacangan | RT 4/ IV | Puri | Pati | sedang | 5,52 | 5,52 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 29 | Puri Eliem (Lawet) | RT 2/VII | Puri | Pati | Ringan | 1,08 | 1,08 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 30 | Winong Wetan RT 2,4/2 | RT 2,4/II | Puri | Pati | sedang | 3,10 | 3,10 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 31 | Winong Kulon RT 11,12,13/3 | RT 11,12,13/III | Winong | Pati | sedang | 4,25 | 4,25 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 32 | Panjunan RT 16,17,20/3 | RT 16,17,20/III | Winong | Pati | sedang | 7,60 | 7,60 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 33 | Sambiroto Wetan | RT 10/I | Panjunan | Pati | Ringan | 7,82 | 7,82 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 34 | Sambiroto RT 9/I | RT 9/I | Sambiroto | Tayu | sedang | 3,38 | 3,38 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 35 | Sambiroto TPI | RT 5/I | Sambiroto | Tayu | sedang | 2,64 | 2,64 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 36 | Pecingan | RT 6/I | Sambiroto | Tayu | sedang | 4,42 | 4,42 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 37 | Widengan | RT 1,2,3/VII | Sambiroto | Tayu | sedang | 4,97 | 4,97 | - | Sudah ditangani, masih menyisakan RTLH |
| 38 | Mbelah | RT 1,2,3/Idan RT 1,2,3/II | Margomulyo | Tayu | sedang | 3,42 | 3,42 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 39 | Randugunting | RT 1,2,4/IV | Margomulyo | Tayu | sedang | 9,40 | 9,40 | - | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 40 | Bulak Kidul | RT 5/Idan RT 2,5/II | Pecangsaan | Batang an | Berat | 7,08 | 7,08 | | Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan |
| 41 | Klop | RT 7/II | Banyutowo | Dukuh seti | Berat | 0,96 | - | 0,96 | Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan |
| 42 | Purbomencil | RT 6/I | Banyutowo | Dukuh seti | Berat | 0,26 | 0,26 | | sudah ditangani, menjadi tidak kumuh |
| 43 | Puncel Tambak | RT 1,2,4/Idan RT 4/VII | Banyutowo | Dukuh seti | Berat | 10,09 | 7,36 | 2,73 | Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan |
| 44 | Buloh | RT 1,4,5/VI | Puncel | Dukuh seti | Berat | 15,09 | 4,73 | 10,36 | Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan |
| | | | Kayen | Kayen | sedang | 12,14 | 2,72 | 9,42 | Sudah ditangani, menjadi kumuh ringan |
| Jumlah Luas | | | | | | 181,58 | 158,11 | 23,47 | |

Sumber : Disperkim Kab. Pati

Dari tabel diatas dijelaskan bahwa luas permukiman kumuh: 181, 58 Ha. Penanganan kumuh sampai dengan akhir Desember 2021 : 158,11 Ha. Jadi sisa permukiman kumuh sampai dengan akhir tahun 2021 seluas 23,47 Ha. Dengan catatan luas kumuh 23,47 Ha ini statusnya semula kumuh berat menjadi kumuh ringan.

Program atau kegiatan yang dilakukan pada tahun 2021 yang mendukung sasaran Berkurangnya kawasan permukiman kumuh sebagai berikut :

1.Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum.

Penyebab kurang maksimalnya kinerja karena adanya permasalahan yang terjadi dari indikator kinerja diatas adalah :

1. Luasnya wilayah cakupan sasaran;
2. Penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat selama ini kurang menjadi perhatian dalam intervensi (untuk desa dampingan non kotaku) mengingat anggaran Pemda Kabupaten relatif kecil dan untuk tahun 2021 anggaran BDI kotaku sudah tidak ada lagi.

Sehingga solusi yang diharapkan dari bidang dan seksi yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Penambahan sarana dan prasarana untuk mencapai sasaran kinerja;
2. Perlu adanya kolaborasi dari Pemerintah Daerah dan stake holder yang ada untuk penanganan kawasan kumuh kedepan.

Sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis diatas adalah personil yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 26 orang.

Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran Berkurangnya kawasan permukiman kumuh sebesar Rp. 1.468.060.600,- (Satu milyar empat ratus enam puluh delapan juta enam puluh ribu enam ratus rupiah) atau 12,92 persen dari total belanja Disperkim Kabupaten Pati pada DPA murni Tahun Anggaran 2021. Tapi setelah ada perubahan pada DPPA Tahun Anggaran 2021 menjadi Rp1.548.866.300,- (Satu milyar lima ratus empat puluh delapan juta delapan ratus enam puluh enam ribu tiga ratus rupiah).

Sasaran 2 : Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni.

Dalam usaha mencapai sasaran Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni tahun 2021 Disperkim Kabupaten Pati menetapkan 3 (tiga) indikator kinerja utama.

Capaian kinerja tahun 2021 untuk indikator kinerja Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh sebesar 129,99 persen, Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di luar kawasan kumuh sebesar 105,63 persen . Persentase pengurangan *backlog* sebesar 104,48 persen.

Hal ini dapat dilihat pada tabel III.5 dibawah ini :

Tabel III.5
Capaian Kinerja IKU pada sasaran
Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni.
Disperkim kab. Pati tahun 2021

| No | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA | satuan | Capaian Kinerja |
|----|---|---|--------|-----------------|
| | | | | 2021 |
| 2 | Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni | 1. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh | % | 129,99 |
| | | 1. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di luar kawasan kumuh | % | 105,63 |
| | | 2. Persentase pengurangan backlog | % | 104,48 |

Sumber : disperkim kab. Pati

Untuk mendukung tercapainya sasaran strategis Meningkatkan capaian kebutuhan rumah layak huni : Untuk indikator kinerja Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di kawasan kumuh dapat dilihat pengukuran dari : jumlah RTLH di kawasan kumuh yang ditangani : 939 unit, dibagi jumlah RTLH di kawasan kumuh :804 unit dikalikan 100 persen = 116,79 persen. target tahun 2021 sebesar 89,842 persen. Capaian kinerja 129,99 persen.

Untuk indikator kinerja Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di luar kawasan kumuh dapat dilihat pengukuran dari : jumlah RTLH diluar kawasan kumuh yang ditangani : $6304 + 3302 = 9606$ unit, dibagi jumlah RTLH diluar kawasan kumuh :31.025 unit dikalikan 100 persen = 30,96 persen. target tahun 2021 sebesar 29,31 persen. Capaian kinerja 105,63 persen.

Indikator Persentase pengurangan backlog pengukurannya dapat dilihat dari: jumlah pembangunan baru RLH : $1876 + 214 = 2090$ dibagi jumlah seluruh backlog = 78.018, dikalikan 100 persen = 2,679 persen. Target tahun 2021 sebesar 2,564 persen. Capaian kinerja = 104,48 persen.

Tabel III.6
Data Rumah Layak Huni dan Rumah Tidak Layak Huni
Di Kabupaten Pati Tahun 2021

| NO | KECAMATAN | JUMLAH RUMAH | JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI | JUMLAH RUMAH TIDAK LAYAK HUNI |
|----|---------------|----------------|-------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Sukolilo | 25,323 | 23,557 | 1,766 |
| 2 | Kayen | 21,878 | 19,171 | 2,707 |
| 3 | Tambakromo | 15,422 | 13,893 | 1,529 |
| 4 | Winong | 18,394 | 16,989 | 1,405 |
| 5 | Pucakwangi | 13,231 | 12,758 | 437 |
| 6 | Jaken | 13,794 | 10,270 | 3,524 |
| 7 | Batangan | 13,673 | 13,170 | 503 |
| 8 | Juwana | 24,765 | 23,717 | 1,048 |
| 9 | Jakenan | 15,508 | 14,350 | 1,158 |
| 10 | Pati | 28,327 | 28,045 | 282 |
| 11 | Gabus | 18,172 | 17,654 | 518 |
| 12 | Margorejo | 17,679 | 17,611 | 68 |
| 13 | Gembong | 13,220 | 13,124 | 96 |
| 14 | Tlogowungu | 15,305 | 14,336 | 969 |
| 15 | Wedarijaksa | 17,902 | 17,134 | 768 |
| 16 | Margoyoso | 19,284 | 18,240 | 1,044 |
| 17 | Gunungwungkal | 10,793 | 10,421 | 372 |
| 18 | Cluwak | 13,994 | 13,723 | 271 |
| 19 | Tayu | 18,980 | 18,590 | 390 |
| 20 | Dukuhseti | 17,990 | 17,106 | 884 |
| 21 | Trangkil | 17,744 | 16,463 | 1,281 |
| | JUMLAH | 371,378 | 350,322 | 21,056 |

Sumber : Disperkim Kab. Pati

Dari tabel diatas dijelaskan : Penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) sampai dengan akhir tahun 2021 mencapai 350.322 unit rumah. Jadi sampai dengan akhir tahun 2021 sisa rumah tidak layak huni (RTLH) = 21.056 unit rumah.

Pengukuran antara target dan realisasi kinerja pada tahun 2021, peningkatan hal ini dapat dilihat pada perbandingan tahun 2019, 2020 dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel III.7 dibawah ini:

Tabel III.7
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja
Antara Tahun 2019, 2020 dan Tahun 2021
Disperkim Kab. Pati Tahun 2021

| Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2019 | | Capaian Kinerja thn 2019 (%) | Tahun 2020 | | Capaian Kinerja thn. 2020 (%) | Tahun 2021 | | Capaian Kinerja thn. 2021(%) |
|---|--------|------------|-----------|------------------------------|------------|-----------|-------------------------------|------------|-----------|------------------------------|
| | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | | Target | Realisasi | |
| 1. Persentase pengurangan kawasan kumuh | % | 0,088 | 0,542 | 616 | 0,622 | 0,235 | 535 | 0,533 | 0,12 | 564 |
| 2. Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di luar kawasan kumuh | % | 11,77 | 10,04 | 85,30 | 20,51 | 20,32 | 99,07 | 29,31 | 30,96 | 105,63 |
| 3. Persentase pengurangan backlog | % | 1,282 | 1,860 | 145 | 1,923 | 2,404 | 125 | 2,564 | 2,679 | 104,48 |

Sumber : Disperkim Kab. Pati

Dari tabel diatas dijelaskan dari 3 (tiga) Indikator kinerja utama capaian kinerja antara tahun 2019, 2020 dan 2021 ada kenaikan yang sangat tinggi pada IKU persentase pengurangan kawasan kumuh. Rata – rata capaian kinerjanya sebesar 571,66 persen.

Perbandingan antara Realisasi Kinerja tahun 2021 dengan target kinerja tahun 2022 dapat dilihat pada tabel III.7 dibawah ini:

Tabel III.8
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan target kinerja 2022

| No | Indikator Kinerja | Satuan | Tahun 2021 | Tahun 2022 |
|----|--|--------|------------|------------|
| | | | Realisasi | Target |
| 1 | Persentase pengurangan kawasan kumuh | % | 0,12 | 0,444 |
| 2 | Persentase pengurangan rumah tidak layak huni (RTLH) di luar kawasan kumuh | % | 30,96 | 38,11 |
| 3 | Persentase pengurangan backlog | % | 2,679 | 3,204 |

Sumber : Disperkim Kab. Pati

Program yang dilakukan pada tahun 2021 yang mendukung Sasaran Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni sebagai berikut :

1. Program Pengembangan Perumahan.

2. Program Kawasan Permukiman.
3. Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman

Penyebab kurang maksimalnya kinerja karena adanya permasalahan yang terjadi dari indikator kinerja diatas adalah :

1. Adanya refocusing dana APBD guna penanganan Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya jumlah rumah layak huni yang dibangun, sehingga target capaian berkurang;
2. Terbatasnya dana APBD untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas rumah layak huni menyebabkan keseluruhan komponen/persyaratan rumah layak huni tidak dapat terpenuhi;
3. Terbatasnya kelompok penerima bantuan sosial RTLH pada Perbup No. 101 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, menyebabkan banyak calon penerima bantuan yang tidak bisa terakomodir.
4. Perubahan Tupoksi dari Pemerintah Pusat /Kementrian PUPR Yang Mengaktifkan Satker/Balai Penyediaan Perumahan sbg Instansi vertikal perbantuan dari kementrian sehingga tugas dari Disperkim sebagai Instansi perumahan di daerah kurang dilibatkan dalam proses pemberian bantuan sehingga data desa dan permasalahan penanganannya kurang maksimal

Sehingga solusi yang diharapkan dari bidang dan seksi yang terkait adalah sebagai berikut :

1. Mengusulkan penambahan bersaran dana APBD untuk peningkatan capaian dan target rumah layak huni yang dibangun.
2. Mengusulkan penambahan besaran dana untuk RTLH tiap unit rumah, baik untuk pembangunan baru maupun peningkatan kualitas;
3. Mengusulkan penambahan kelompok penerima bansos RTLH sehingga dapat mengakomodir kelompok penerima yang lain.
4. Proaktif koornasi dengan Balai/Satker.

Sumber daya manusia yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni adalah personil yang ada di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebanyak 26 orang. Anggaran yang digunakan untuk mencapai sasaran Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni sebesar Rp. 5.670.709.700 ,- (Lima miliar enam ratus tujuh puluh juta

tujuh ratus Sembilan ribu tujuh ratus rupiah) atau 49,92 persen dari total belanja DISPERKIM Kabupaten Pati.

4. REALISASI ANGGARAN

Setelah APBD Perubahan total anggaran belanja berubah menjadi sebesar Rp. 10.013.003.000,00. Hal ini dilakukan karena adanya refokusing anggaran untuk mempercepat capaian penangana covid-19. Belanja langsung sebesar Rp 6.299.657.350,00. Belanja tidak langsung Rp.3.713.345.650,00. Serapan anggaran keseluruhan sebesar Rp. 9.817.370.796,00,- atau 98,05 %. Serapan belanja langsung Rp. 6.246.005.870,- atau 99,15 %. Serapan belanja tidak langsung sebesar Rp. 3.563.364.926,- atau 95,96 % .Jika dilihat dari realisasi anggaran pada sasaran, penyerapan anggaran terserap 99,15 %.

Efektifitas penggunaan anggaran untuk mewujudkan sasaran strategis di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati dapat dilihat pada tabel III.9 dibawah ini

Tabel III.9
Efektifitas Penggunaan Anggaran
Disperkim Kab.Pati Tahun 2021

| No | Sasaran Strategis | Anggaran | Realisasi | % |
|----|---|---------------|---------------|-------|
| 1 | Berkurangnya kawasan permukiman kumuh | 1.548.866.300 | 1.543.073.950 | 99,63 |
| 2 | Meningkatnya capaian kebutuhan rumah layak huni | 4.750.791.050 | 4.702.931.920 | 98,99 |

Sumber : Disperkim Kab. Pati

Pada tabel diatas dijelaskan bahwa penggunaan anggaran sudah efektif dan optimal.

BAB IV

PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di DISPERKIM Kabupaten Pati pada Tahun Anggaran 2021, maka capaian kinerja Disperkim Kabupaten Pati dapat digolongkan *sangat berhasil* karena total capaian dari dua sasaran rata-rata *226 persen*.

Keberhasilan pencapaian target yang telah ditetapkan tidak lepas dari upaya Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pati serta peran serta masyarakat dan pihak lain yang ikut berperan serta dalam pembangunan Bidang Perumahan Rakyat di Kabupaten Pati.

Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pati



Ir. JOKO CIPTO HASTONO, MM

Pembina Tingkat I

NIP.19660110 199203 1 010



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. PURWADI, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.
Jabatan : Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.


Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 19 Januari 2021

Pihak Kedua,
Bupati Pati

HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pati
Kepala DLH Kabupaten Pati

R. PURWADI, M.M.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. PURWADI, M.M.
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Pati

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.
Jabatan : Bupati Pati

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pati, 19 Januari 2021

Pihak Kedua,
Bupati Pati


HARYANTO, S.H., M.M., M.Si.

Pihak Pertama,
Plt. Kepala Dinas Perumahan dan
Kawasan Permukiman Kabupaten Pati
Kepala DLH Kabupaten Pati


R. PURWADI, M.M.